

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1.1 Sejarah Singkat Kementerian Kehutanan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan bahwa pengurusan hutan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kemakmuran masyarakat.

Pengurusan hutan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yang mencakup:

1. Pengaturan pemolaan dan penataan kawasan hutan.
2. Pengaturan dan penyelenggaraan perusahaan hutan.
3. Pengaturan terhadap perlindungan proses ekologi yang mendukung sistem. Penyangga kehidupan serta rehabilitasi hutan, tanah dan air.
4. Pengaturan terhadap usaha-usaha terselenggaranya dan terpeliharanya pengawetan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Penyelenggaraan penyuluhan dan pendidikan di bidang kehutanan.

Agar usaha-usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hutan tersebut secara administratif dan teknis dapat terselenggara dengan baik maka

diperlukan adanya wadah atau sarana kelembagaan yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan di bidang kehutanan.

1.1.2 Logo Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan memiliki identitas logo organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut ini :

GAMBAR 1.1
LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN



Sumber : www.dephut.go.id

Logo Kementerian Kehutanan memiliki makna dan arti sebagai berikut, antara lain :

Departemen Kehutanan memiliki lambang yang berbentuk Bulatan di dalamnya terdapat ilustrasi dari bentuk gambar pohon dan aliran air, didalam lambang ini terdapat 4 warna unsur utama yakni Hitam, Hijau, Biru dan Coklat. Lambang ini selain digunakan sebagai logo utama instansi

Kementerian Kehutanan juga dikenakan sebagai tanda pengenal yang dipasang di lengan baju sebelah kiri. Lambang ini mempunyai arti kiasan sebagai berikut:

- **Warna hitam**

Dalam bentuk lingkaran pada bagian luar logo melambangkan keabadian dan sebagai suatu kesatuan tekad yang mantap para rimbawan untuk menjaga rimba agar tetap lestari secara konservasi.

- **Pohon hijau**

Melambangkan hutan yang subur yang mempunyai berbagai fungsi dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- **Pohon hitam**

Melambangkan hutan yang produktif yang berfungsi sebagai sarana pendukung pembangunan nasional.

- **Garis-garis lengkung biru**

Melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air.

- **Warna dasar coklat**

Melambangkan tanah yang subur berkat adanya usaha konservasi tanah.

- **Keseluruhan lambing**

Departemen Kehutanan ini mencerminkan giat usaha para rimbawan yang aktif membantu usaha pembangunan hutan dan kehutanan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mencapai masyarakat Indonesia

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

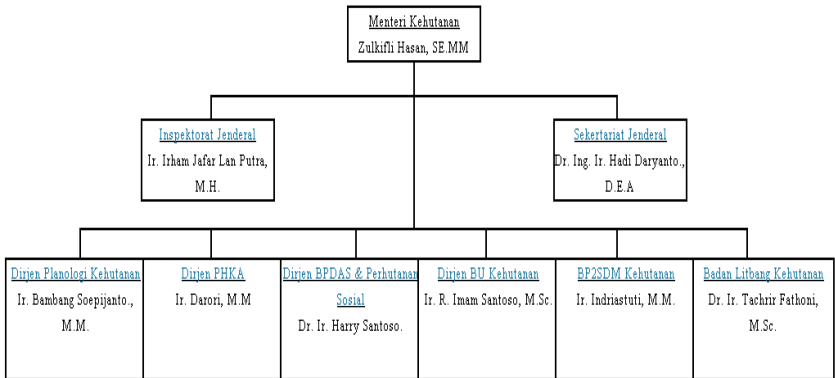
1.1.3 Sekilas Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan sebagai suatu rangkaian usaha diarahkan dan direncanakan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya hutan secara maksimal dan lestari. Tujuannya adalah untuk memadukan dan menyeimbangkan manfaat hutan dengan fungsi hutan dalam keharmonisan yang dapat berlangsung secara paripurna.

Berbagai masalah yang berupa ancaman, gangguan, dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, tidak akan dapat terselesaikan secara tuntas apabila pengendaliannya tidak bersifat strategis, yaitu melalui penanggulangan secara konsepsional dan paripurna dengan sistem manajemen yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan kehutanan yang sudah semakin meningkat.

Dalam kondisi seperti itu maka perlu adanya suatu bentuk administrasi pemerintahan yang sesuai dan memadai, sebagai sarana yang sangat dibutuhkan bagi terlaksananya keberhasilan pembangunan kehutanan. Susunan organisasi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN KEHUTANAN



Sumber : www.dephut.go.id

1.2 Gambaran Umum Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

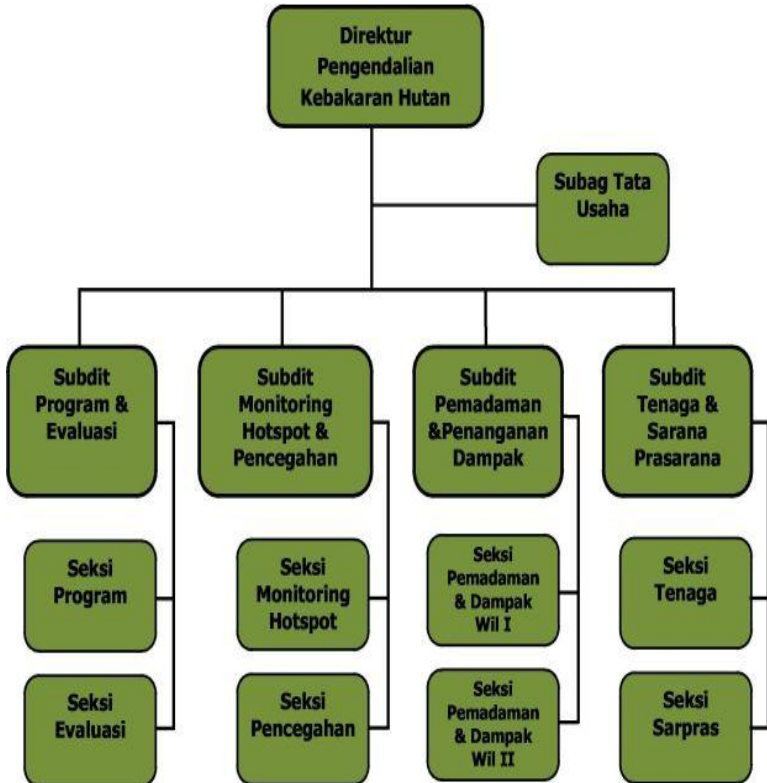
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan merupakan salah satu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : **P.40/Menhut-II/2010** tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan*, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan pengendalian dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan pengendalian dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan pengendalian dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan pengendalian dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1.3

**STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN**



Sumber : <http://www.indofire.org>

1.2.1 Visi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Terwujudnya sistem dalkarhut yang optimal, masyarakat terlindungi jiwa, raga dan harta serta bebas dari pencemaran asap.

1.2.2 Misi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

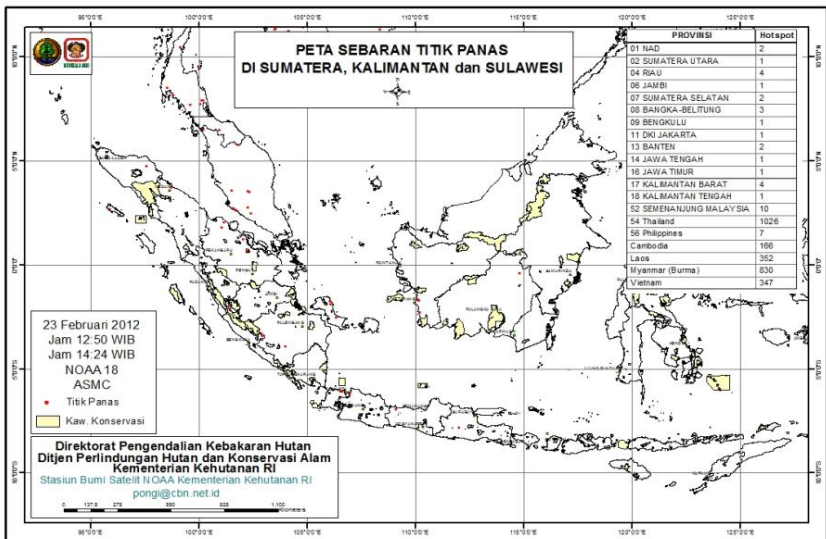
Melakukan pencegahan kebakaran hutan (peningkatan kepedulian), pemadaman dini secara efektif dan efisien serta pengendalian pasca kebakaran hutan.

1.3 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan cukup luas, sampai saat ini masih dihadapkan pada ancaman lingkungan berupa degradasi hutan yang sangat tinggi, dimana kita tahu banyaknya terjadi kebakaran hutan yang sering melanda Indonesia. Hal ini juga bisa memicu potensi dimana kita tahu makin maraknya isu *global warming*. Jika kita hubungkan dengan kebakaran hutan yang ada di Indonesia bukan tidak mungkin Indonesia nantinya bisa menjadi salah satu negara yang menyumbangkan dampak global warming yang paling besar. Untuk mengatasi masalah ini sudah banyak program yang dicanangkan Kementerian Kehutanan seperti contohnya gerakan menanam 1 miliar pohon dan banyak program lainnya. (www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8169)

Adapun data tentang kebakaran hutan yang ada Indonesia dapat ditelusuri dari gambar dan data berikut :

GAMBAR 1.4
PETA SEBARAN TITIK PANAS



Sumber : www.indofire.org/

GAMBAR 1.5

PERKIRAAN KERUSAKAN KAWASAN YANG DISEBABKAN OLEH KEBAKARAN HUTAN

Perkiraan Kerusakan yang Disebabkan oleh Kebakaran Hutan

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bengkulu	216	119	405	317	85
2	Jambi	1.922	1.314	1.695	1.675	622
3	Lampung	1.021	481	317	271	123
4	Riau	5.217	2.377	3.109	4.375	1.780
5	Sumatera Barat	369	184	661	558	273
6	Sumatera Selatan	5.439	2.538	2.851	3.571	1.477
7	Sumatera Utara	865	513	774	993	516
8	Kalimantan Barat	6.500	3.108	2.875	7.273	1.755
9	Kalimantan Tengah	7.857	2.827	1.850	4.952	872
10	Kalimantan Timur	1.773	1.443	1.262	2.124	939
TOTAL		24.686	14.904	13.951	26.104	8.442

Statistik Kehutanan Indonesia Forestry Statistic of Indonesia tahun 2007-2011



Sumber : Buku Statistik Kehutanan Indonesia

Berhubungan data di atas Indonesia juga menempati negara kedua yang kebakaran hutannya paling banyak di Asia Tenggara pada tahun 2011. Peringkat itu naik dibandingkan tahun 2010 di posisi keenam. Sesuai data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, jumlah titik api hingga September 2011 adalah 22.128. Jumlah tersebut terbilang sangat tinggi karena jumlah titik api tahun 2010 hanya sebesar 9.096. Jumlah titik kebakaran hutan tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua se-Asia Tenggara atau satu tingkat di bawah Myanmar.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, ada 10 daerah utama penyumbang kebakaran tertinggi di Indonesia yakni Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Bengkulu. Dari total kebakaran hutan, sekitar 80% kebakaran terjadi di kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) seperti perkebunan dan pertanian dan sisanya di kawasan hutan. (www.indofire.org)

Maka dari itu Kementerian Kehutanan juga mempunyai divisi dimana divisi tersebut mempunyai fungsi untuk melayani masyarakat dan untuk menanggulangi aspek-aspek yang berhubungan dengan kebakaran hutan baik itu pencegahan atau pasca kebakaran hutan. Adapun divisi yang dimaksud adalah Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pengendalian kebakaran hutan tidak hanya dituntut tanggung jawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan dengan intensitas pekerjaan yang tinggi.

(repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/)

Jika beban tugas besar dan memiliki intensitas tinggi maka mengharuskan pegawai memiliki motivasi dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal (ivancevich 2007: 145)

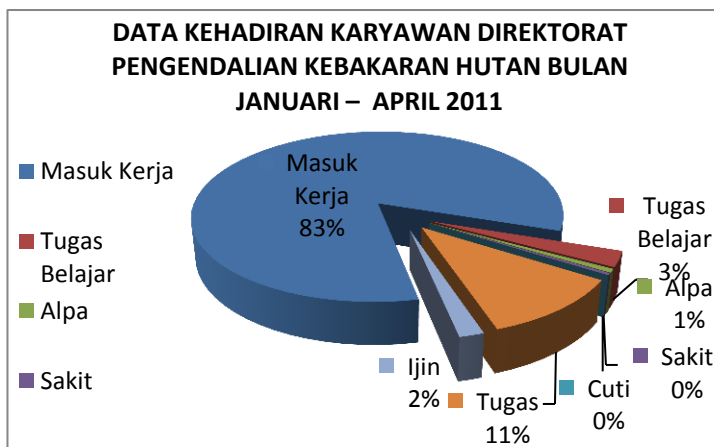
Motivasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kerja pegawai. Motivasi menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itulah tidak heran jika petugas yang mempunyai motivasi yang tinggi biasanya mempunyai efektivitas Kerja yang tinggi pula. Untuk itu motivasi pegawai perlu dibangkitkan agar pegawai dapat menghasilkan efektivitas kerja yang terbaik. (Robbins 2012: 423)

Namun, masalah yang dihadapi oleh setiap instansi sekarang ini adalah banyaknya pegawai yang berpandangan bahwa efektivitas pegawai akan meningkat apabila pegawai termotivasi dengan adanya pemberian kompensasi. Pada kenyataannya, bukan hanya upah yang dapat membuat seseorang pegawai tetap bertahan di suatu instansi tetapi banyak faktor-faktor

lain yang mempengaruhi yaitu antara lain : kesejahteraan, motivasi kerja, dan disiplin kerja. (undip.ac.id/daftar_tesis)

Untuk menelusuri lebih jauh, penulis melakukan studi kasus pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Jakarta. Dari data kehadiran yang dimiliki oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Jakarta, dalam 4 (empat) bulan kehadiran Pegawai yang dikategorikan tugas menunjukkan jumlah yang paling banyak. Data kehadiran tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.6 :

GAMBAR 1.6
DATA KEHADIRAN PEGAWAI DIREKTORAT
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN BULAN JANUARI –
APRIL 2011



*Sumber : Data Internal Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
Kementerian Jakarta*

Bisa dilihat pada data kehadiran yang ada pada gambar 1.6 tingkat kehadiran pegawai di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan cukup tinggi. Hal ini merupakan prestasi yang baik jika ditinjau dari segi kehadiran para pegawai. Dari data tersebut hanya 2% yang ijin dan 1% alpa dan adapun jumlah pegawai yang tidak masuk 11% dikarenakan tugas yang diberikan oleh intansi dan 3 % tugas belajar. Data tersebut juga menjelaskan bahwa pegawai mempunyai pekerjaan yang cukup banyak di luar kantor yaitu jika dikalkulasikan 15% pegawai harus mengikuti dinas di luar lingkup kantor.

Hal ini yang harus dicermati karena adanya beban tugas yang lebih banyak jika pegawai harus berada di luar kantor. Adapun data beban tugas dan hasil kerja yang ada pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan pada tahun 2010 adalah dengan pengukuran efektivitas kerja yang dilakukan dengan cara melihat prosentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Target yang ditetapkan, telah diuraikan di dalam indikator Kerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pada laporan ini, indikator Kerja yang diukur adalah indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil). Hasil pengukuran Kerja terhadap misi, sasaran, program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel RKT (Rencana Kerja Tahunan), PKK (Pengukuran Kerja Kegiatan), dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) sebagaimana yang ada dalam Data berikut :

TABEL 1.1
PENCAPAIAN KERJA TAHUN 2011

No	Program	Jumlah Kegiatan	Pencapaian Kerja		
			Masukan	Keluaran	Hasil
1	2	3	4	5	6
1	Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH	12	49,51 %	82,20%	81,64%
2	Peningkatan kualitas dan akses informasi Hotspot	2	43,42%	100,00%	75,00 %
3	Rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Kebakaran Hutan	5	56,31 %	78,33%	80,41%
4	Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA	1	31,97%	100,00 %	80,00%
5	Pemantapan keamanan Dalkarhut	3	36,48 %	93,33%	74,81 %
6	Perlindungan dan konservasi SDA	8	37,31 %	85,75 %	72,84 %
7	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	13	73,59 %	96,79 %	84,99 %
8	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Dalkarhut	1	80,30 %	98,14 %	81,64 %
9	Pendidikan Kedinasan	3	77,54%	80,70 %	80,70 %
10	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	3	76,34 %	98,35%	96,83 %
Rata-rata			57,51 %	87,85 %	81,28 %

Sumber : Data internal Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pencapaian kerja hasil pembangunan pengendalian kebakaran hutan tahun 2011 sebesar 81,28 %, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 88,94 %, dan tahun 2009 sebesar 90,46%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Kerja program Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,21 %.

2) Program 1: Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kerja pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman secara lestari, dalam rangka pencegahan Kebakaran Hutan.

- Pencapaian Kerja program ini digambarkan dengan nilai rata-rata Sebesar 81,64 %, dengan hasil pelaksanaan programantara lain :

- a. Peta paduserasi provinsi Kalimantan Tengah
- b. Data dan dokumen pengukuhan kawasan hutan di 12 provinsi
- c. Penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan hutan di 2 provinsi
- d. Surat Keputusan penetapan kawasan hutan sebanyak 75 buah
- e. Peta kawasan hutan yang sesuai dengan peta dasar tematik kehutanan di seluruh Indonesia.
- f. Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan di 12 lokasi
- g. Penyelesaian masalah pertanahan dalam kawasan hutandi 10 lokasi

- h. Rencana pemanfaatan areal eks HPH/HTI untuk HHBK 4 provinsi
 - i. Unit manajemen hutan tanaman 11 lokasi
 - j. Penilaian Kerja pengendalian kebakaran hutan
 - k. Pengkayaan dan pemeliharaan hasil pengkayaan hutan di 4 provinsi (Sumbar, Kalbar, Kaltim, Kalsel)
 - l. Penyempurnaan Permenhut pengganti Kepmenhut No.326/Menhut-II/2003
 - m. Sistem informasi pinata usahaan Hot spot online nasional
 - Hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian Kerja, antara lain:
 - n. Penyelesaian penetapan Hotspot kawasan hutan
 - o. Penataan batas Hotspot kawasan hutan
- 3) Program 2: Peningkatan kualitas dan akses informasi Hotspot
- Program ini bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi Hot Spot yang lengkap, akurat, baik spatial maupun bukan spatial bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan
 - Kerja program ini pada tahun 2011 sebesar 75,00 %, dengan hasil program antara lain :
- a. Data dan informasi neraca sumber kawasan Hot spot di Indonesia
 - b. Data luas dan persebaran penutupan lahan sebanyak 300 lembar peta

- c. Data penutupan lahan di Sumatera dan Sulawesi
 - d. Data digital kontur 300 lembar
 - e. Data tematik kondisi kawasan hutan provinsi 300 lembar
 - f. Data tematik kehutanan di 29 provinsi
- 4) Program 3: Rehabilitasi dan Pemulihan Pasca Kebakaran Hutan
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kelestarian pasca Kebakaran hutan meningkatkan Restrukturisasi kembali hutan rakyat pasca kebakaran, dan meningkatkan usaha perbenihan. Pencapaian Kerja program pada tahun 2011 sebesar 80,41 %, dengan 5 kegiatan pokok.
 - Hasil dari pelaksanaan program adalah kegiatan:
 - a. Pembangunan Gerhan dengan hutan tanaman reboisasi seluas 28.536 ha, tanaman hutan rakyat 51.016.944 ha, tanaman hutan mangrove 2.911 ha, dan tanaman silvikultur intensif 2.276 ha, HTI 447.982 ha, Perum Perhutani 201.564 ha, hutan meranti 2.799 ha
 - b. Bangunan konservasi tanah (dam, embung, sumurresapan) sebanyak 2.568 unit
 - c. Pembangunan areal model hutan rakyat 500 ha, dan areal model wanatani 140 ha
 - d. Rencana teknik tahunan tahun 2011 di 23 DAS
 - e. Pembangunan perbenihan masyarakat 6 unit
 - f. Data dan informasi perbenihan 4 BPTH

- g. Indonesia menanam 79 juta batang
 - h. Perempuan menanam 12 juta batang
 - i. Penanaman kemitraan dengan 32 ormas sebanyak 3,2 juta batang
- 5) Program 4: Pengembangan Kapasitas pengelolaan SDA
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan terhadap potensi kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat di kehutanan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan dan ekosistemnya untuk pencegahan kebakaran hutan
 - Nilai pencapaian Kerja program ini, yaitu sebesar 80,00 %, dengan hasil program antara lain :
 - a. Pembangunan hutan kemasyarakatan tahun 2011 seluas 50 ha
 - b. Hasil evaluasi tahun 2011, program HKM melibatkan masyarakat sebanyak 57 Kelompok Tani terbaik (6.742 KK), dengan luas lahan 8.811,06 Ha di Lampung, DIY, dan NTB. Untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan rehabilitasi kawasan hutan Negara. Pemberdayaan masyarakat (PHBM) di areal IUPHHK-HA 16.015 KK dan IUPHHK-HTI 30.557 KK
 - c. Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 1,6 juta KK
 - d. Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 425.764 KK di 1.333 desa

- e. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan rawan kebakaran 29 provinsi, 58 desa, 1.160 KK
- 6) Program 5: Pemantapan Keamanan Dalkarhut
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) untuk menanggulangi perusakan dan pembakaran kawasan hutan negara dan praktek-praktek yang merusak kawasan Hutan.
 - Kerja program ini yaitu sebesar 74,81 %, dengan hasil pelaksanaan program antara lain :
 - a. Penyusunan rencana penyidikan dan perlindungan 10 judul
 - b. Pelatihan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Diklat Polhut dan PPNS sebanyak 8.153 orang, jumlah SPORC 893 orang 11 provinsi.
 - c. Rapat kerja pengamanan hutan dengan instansi terkait
 - d. Penanganan perkara tindak pidana kehutanan 1 paket
 - e. Advokasi penanganan perkara 1 paket
 - f. Pelanggaran pencurian kayu tahun 2011 sebanyak 293 kasus (2010 : 1422 kasus), kebakaran hutan 11 kasus (2010: 28 kasus), perambahan 39 kasus (2010 : 84 kasus). Terjadi penurunan kasus pelanggaran kehutanan pada tahun 2011

- g. Perbaikan tata usaha hasil hutan (SAKB, faktur, SKAU, *logtracking* atau *barcode system*)

7) Program 6: Perlindungan dan Konservasi SDA

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan, pengelolaan Taman Nasional dan pengelolaan kawasan konservasi lainnya.

- Kerja program ini pada tahun 2011 digambarkan daripencapaian Kerja 8 kegiatan yang rata-ratanya sebesar 72,84 %. Pencapaian Kerja tahun 2011 mengalamipenurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 83,58 %.

- Beberapa hambatan yang mempengaruhi hasil pencaapaian Kerja antara lain: pengembangan 20 TN model/mandiri karena belum tersedianya pola optimalisasi pengelolaan TN model dan mandiri; dan pengembangan kerjasama kemitraan bidang KSDAHE karena belum terselesaikannya kasus tumpang tindih kawasan.

- Hasil pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Pemantauan hotspot di 25 provinsi, dimana tahun 2007 jumlah hotspot yang teridentifikasi dalam kawasan hutan 343 titik, dan di lahan 1.081 titik
- b. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
- c. Pengendalian kebakaran lahan dan hutan di BKSDA/BTN rawan kebakaran di 11 provinsi

- d. Pembentukan masyarakat peduli api di Bengkulu, Sumbar, Sumut, Sulsel, dan Kalbar
 - e. Inventarisasi areal bekas kebakaran di Riau, Jambi, TN Ciremai, TN Gunung Palung, dan Kalimantan Tengah
 - f. Pengelolaan jasa lingkungan dan jasa wisata di 10 lokasi
 - g. Pengkajian kebijakan perburuan satwa liar
- 8) Program 7: Penelitian dan Pengembangan IPTEK Dalkarhut
- Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan hutan.
 - Kerja program ini tahun 2011 sebesar 81,64 %, sementara pada tahun 2010 sebesar 90,44%.
 - Hasil Kerja program antara lain:
 - a. Teknologi pengembangan jenis-jenis pohon dan rehabilitasi sebanyak 55 kegiatan
 - b. Teknologi peningkatan produktivitas hutan sebanyak 198 kegiatan
 - c. Teknologi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebanyak 141 kegiatan
 - d. Teknologi pembuatan, pengelolaan, pemanfaatan HHBK dan jasa hutan
 - e. Tehnik pengkayaan dan inventarisasi hutan alam 17 kegiatan
 - f. Model dan pola partisipasi masyarakat sebanyak 35 kegiatan

9) Program 8: Pendidikan Kedinasan

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat, pengembangan tenaga kediklatan, serta pengembangan organisasi kediklatan Pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan.

- Pencapaian Kerja program ini pada tahun 2011 sebesar 80,70 %, sedangkan tahun 2010 sebesar 97,24 %.

- Hasil Kerja program ini antara lain:

- a. Jumlah yang terdidik di SKMA Manokwari, Diploma IV penyuluhan dan S1 kerjasama, 253 orang
- b. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, bidang administrasi kepemimpinan 3.463 orang

10) Program 9: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pengendalian dan pelayanan kebakaran hutan umum terhadap masyarakat, serta pengendalian terhadap Kerja aparatur

- Kerja program ini tahun 2011 sebesar 96,83 %, sedangkan tahun 2010 sebesar 86,06%

- Hasil Kerja program ini antara lain:

- a. Laporan hasil pemeriksaan reguler, PNPB, khusus, lainnya, pencermatan kerjasama dan BLN, aset IKMN, evaluasi pencapaian DIPA th 2011, evaluasi pencermatan lainnya 369 LHA
- b. Laporan evaluasi SAKIP dan SAI
- c. Laporan pembinaan wilayah 15 provinsi

11) Program 10: Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perencanaan, pengembangan SDM dan kepegawaian, pengembangan hukum dan kerjasama luar negeri, serta pengendalian pembangunan kembali pasca kebakaran hutan kehutanan.

- Pencapaian Kerja program pada tahun 2011, yaitu sebesar 84,99 %, sedangkan tahun 2010 sebesar 89,86%.

- Hasil dari program ini antara lain:

- a. Arahan kebijakan Departemen kehutanan 288 dokumen
- b. Penerimaan negara bukan pajak Dana Reboisasi 1.358,78 milyar, PSDH 670,09 milyar, IHPH dan IHPHTI 76,01 milyar

- c. Fasilitasi konvensi internasional dan internalisasi konvensi internasional dan perencanaan kehutanan 33 provinsi
- d. Kerjasama lintas sektor dan international (Fleg, MOU dengan Inggris, China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Norwegia)
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
- f. Laporan perkembangan kredit KUK DAS, KUPA, KUHR
- g. Tersedianya sarana dan prasarana kehutanan
- h. Pengendalian kebakaran hutan di tingkat provinsi

**TABEL 1.2
DATA KERJA PEGAWAI 2011**

MISI	TUJUAN	SASARAN	SASARAN KERJA	SASARAN TUJUAN	MISI KERJA
1. Menjamin Keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional	1. Terselenggaranya keamanan dalam dalkarhut	1. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan (SDH) serta informasi hot spot	75,00 %	63,89 %	64,4 %
		2. Tercapainya penunjukkan kawasan hutan di Indonesia yang mempunyai potensi terjadinya kebakaran	41,67 %		
	2. Terjamin dan optimalnya luas dan fungsi	Penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia terkendali	66,11 %	66,11 %	
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari	1. Terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan	1. Terkelolanya kawasan hutan	75,00 %	91,63 %	85,85%
		2. Terwujudnya hutan tanaman yang produktif	100,00 %		
		3. Tercapainya pengelolaan hutan lestari	100,00 %		
		4. Terwujudnya efisiensi Industri Primer Kehutanan	100,00 %		
		5. Tidak terjadi pelanggaran tata usaha hasil hutan	100,00 %		
		6. Tidak terjadi pencurian kayu skala besar di hutan negara	74,81 %		
	2. Terselenggaranya Pengaturan dan pengurusan rehabilitasi dan reklamasi hutan	Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL tersedia dan tersebar di kabupaten sesuai kebutuhan	95,00 %	95,00 %	

MISI	TUJUAN	SASARAN	KERJA SASARAN	KERJA TUJUAN	KERJA MISI
	3. Termanfaat kan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian.	1. Terbentuknya dan beroperasinya Taman Nasional Model	66,67 %	63,16 %	
		2. Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan KPA/KSA/TB secara efektif	50,00 %		
		3. Terwujudnya pengendalian kebakaran hutan yang efektif di Kalimantan dan Sumatera	85,71 %		
		4. Tercapainya pengelolaan SDAH secara lestari	50,29 %		
	4. Terseleng-garanya penga-turan dan pengurusan perencanaan kehutanan	Terwujudnya rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain	100,00 %	100,00 %	
	5. Terwujud nya pemantapan pengelolaan dalkarhut di provinsi, kabupaten/kota	1. Terbangun dan beroperasinya KPH di setiap provinsi	100,00 %	83,87 %	
		2. Tercapainya peningkatan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung	62,50 %		
		3. Tercapainya peningkatan pemanfaatan TSL dan jasa lingkungan secara optimal	89,12 %		
	6. Terseleng-garanya peneli-tian danpengem-bangan,pendidik an dan latihan serta penyuluhan kehutanan	Terwujudnya RISTEK kehutanan yang menjadi acuan pembangunan nasional	84,48 %	84,48 %	

MISI	TUJUAN	SASARAN	KERJA SASARAN	KERJA TUJUAN	KERJA MISI
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai	1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan	Terkendainya erosi, sedimentasi dan banjir di DAS Prioritas	77,50 %	86,25 %	86,2%
		Tercapainya perbaikan penutupan lahan kritis di DAS prioritas, termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA)	95,00 %		
4. Mendorong peran serta masyarakat	1. Terbangunnya masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan	Tercapainya penambahan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat	100,00 %	89,90 %	82,32 %
		Tercapainya pemanfaatan hasil hutan non kayu secara optimal dan lestari	93,12%		
		Terwujudnya daerah penyangga kawasan konservasi yang berfungsi menjaga keutuhan kawasan	75,00%		
		Terwujudnya kemampuan dan peran masyarakat madani dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meningkat	85,00%		
5 . Menjamin Distribusi Manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan usaha di bidang kehutanan	Berkembangnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat	80,00 %	80,00 %	80,00 %
6. Memantapkan koordinasi Pusat dan Daerah	1. Mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan penganggaran, koordinasi pembangunan, dan kesekretariatan pembangunan kehutanan	1. Tercapainya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan kehutanan secara efektif	52,50 %	64,16 %	79,52 %

MISI	TUJUAN	SASARAN	KERJA SASARAN	KERJA TUJUAN	KERJA MISI
		2. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan	50,00 %		
		3. Tersedianya dana, sarana, prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan kehutanan	90,00 %		
	2. Tercapainya pemanfaatan perjanjian global tentang kehutanan dan lingkungan	Peran aktif Indonesia dalam tataran global bidang kehutanan dan SDAH serta kerjasama internasional yang berkontribusi positif pada pembangunan kehutanan ansional	67,50 %	67,50 %	
	3. Mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa	Terwujudnya SDM Kehutanan yang berkualitas, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional	90,62 %	93,72 %	
		Terbentuknya PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya	96,82 %		

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tabel di atas, antara lain:

- 1) Misi 1: Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
 - a. Pencapaian Kerja misi ini sebesar 64,44 %.
 - b. Misi 1 mempunyai 2 tujuan. Melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, tujuan pertama misi ini, yaitu terselenggaranya pengukuhan kawasan hotspot hutan, dapat dicapai Kerjanya sebesar 63,89%. Tujuan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan perpetaan sumber daya hutan; pengembangan sistem informasi kehutanan, pengukuhan kawasan hotspot hutan. Nilai pencapaian Kerja kurang begitu baik karena tidak selesainya kegiatan penyelesaian penetapan kawasan hutan.
 - c. Sedangkan tujuan kedua (terjamin dan optimalnya luas dan fungsi kawasan hutan) hanya dicapai sebesar 66,11%. Tujuan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan.
 - d. Pada tahun 2010, misi ini mencapai nilai yang lebih besar, yaitu 63,28 %.
- 2) Misi 2: Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan

yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

- a. Pencapaian Kerja misi ke-2 ini, tahun 2011 yaitu sebesar 85,25 %.
 - b. Misi ini mempunyai 6 tujuan dan 16 sasaran. Kegiatan yang mendukung misi ini antara lain pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak, pengembangan hutan tanaman, pengelolaan hutan produksi alam, restrukturisasi industri primer kehutanan, penertiban tata usaha hasil hutan, operasi pengamanan hutan, penyelesaian kasus kejahatan hutan, pembangunan sumber benih, pengelolaan taman nasional, pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, penyusunan rencana kehutanan, pembangunan KPH, pengelolaan hutan lindung.
 - c. Pada tahun 2010, Kerja misi-2, sebesar 86,99 %.
- 3) Misi 3: Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
- a. Pencapaian Kerja misi pada tahun 2011 adalah sebesar 86,25%, sedangkan pencapaian Kerja misi ini pada tahun 2010 dinilai sebesar 84,72%.
 - b. Tujuan misi ini adalah memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung system

penyangga kehidupan. Sedangkan kegiatannya adalah pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

- c. Kecilnya pencapaian Kerja misi ini pada tahun 2011 adalah karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- 4) Misi 4: Mendorong peran serta masyarakat
 - a. Kerja misi ini pada tahun 2011, yaitu sebesar 82,32 %, sedangkan pada tahun 2010 Kerjanya mencapai sebesar 95,60%.
 - b. Kerja misi ini dicapai dari pencapaian Kerja kegiatan, yaitu melalui pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi, pengembangan RHL swadaya.
- 5) Misi 5: Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan
 - a. Pada tahun 2011, misi yang mempunyai 1 tujuan dan 1 sasaran ini, hanya dapat dilihat dari Kerja pelaksanaan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan.
 - b. Pencapaian Kerja kegiatan ini tahun 2011 sebesar 80,00%, sedangkan pada tahun 2010 pencapaian Kerja misi 5, mencapai sebesar 96,40 %.
- 6) Misi 6: Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah

- a. Pada tahun 2011, Kerja misi ini dinilai sebesar 79,52 %, sedangkan pencapaian Kerja misi ini pada tahun 2010, yaitu sebesar 91,26 %.
- b. Tujuan dari misi ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi peraturan perundangan, kebijakan, rencana dan penganggaran, koordinasi pembangunan, dan tercapainya pemanfaatan perjanjian, serta mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa. Dalam misi dilakukan melalui kegiatan pembinaan hukum dan peraturan perundangan, desentralisasi kehutanan, pengembangan rencana dan penganggaran, pengembangan organisasi.

PENCAPAIAN KERJA VISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN

- a. Dari hasil pencapaian kerja keenam misi tersebut di atas, maka pencapaian Kerja Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan pada tahun 2011 sebesar 76,34 %, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yang pencapaian keefektifan kerja mencapai sebesar 87,79 %.
- b. Nilai efektif kerja ini menurun dari nilai kerja yang dicapai Direktorat Pengendalian Kebakaran tahun 2010. Namun sesungguhnya hasil yang dicapai pada tahun 2010 jauh lebih besar, karena anggaran yang tersedia juga jauh lebih besar dibandingkan tahun 2008.

- c. Pencapaian kerja yang menurun lebih banyak disebabkan karena dengan belum mantapnya pelaksanaan sistem anggaran berbasis efektivitas kerja (*unified budgeting*).

(Data Internal Laporan Akuntabilitas Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan (LAKIP Kemhut)

Berdasarkan data di atas pada kesimpulannya tugas Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan adalah :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Berdasarkan undang-undang di atas, dimana perlindungan hutan salah satunya adalah membatasi dan mencegah kerusakan hutan akibat kebakaran serta kejadian kebakaran hutan setiap tahunnya merupakan ancaman yang harus segera diselesaikan.

Maka dibentuk sistem cepat tanggap dan pegawai harus terjun langsung untuk melaksanakan tugas pengendalian kebakaran hutan yang

kegiatannya meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca-kebakaran hutan. Adapun sistem yang dimaksud adalah :

- a. Pembangunan kelembagaan melalui pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang didukung dengan personil, sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Pemantapan operasional pengendalian kebakaran hutan yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca-kebakaran.
- c. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.
- d. pengenalan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, pemberdayaan masyarakat serta kampanye
- e. Pemantapan pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran hutan melalui efektivitas pelaksanaan pencegahan, pemadaman maupun penanganan paska kebakaran atau rehabilitasi.
- f. Pemantapan sistem meliputi penyempurnaan perundang-undangan, pembentukan lembaga pengendalian kebakaran hutan serta kerja sama dengan pemerintahan daerah dan pemegang hak/izin.
- g. Pencegahan, Kegiatan pencegahan adalah upaya yang meliputi segala hal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan secara langsung maupun tidak langsung, kegiatannya antara lain kordinasi dengan para pihak, penyuluhan, kampanye, system informasi peringatan dini, dll.

- h. Pemadaman, Kegiatan pemadaman kebakaran hutan meliputi upaya operasional dilapangan baik dalam rangka persiapan pemadaman maupun kegiatan langsung pada setiap kebakaran hutan. Kegiatannya antara lain : Patroli, pemadaman dini, pemadaman mandiri, pemadaman gabungan.
- i. Penanganan pasca kebakaran, Kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan membantu penegakan hukum serta dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan bekas kebakaran. Kegiatannya meliputi antara lain pengumpulan bahan keterangan, identifikasi dan evaluasi serta pemantauan kebakaran hutan dan lahan

Berdasarkan hal tersebut dan perlunya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara cepat, efektif dan efisien untuk mengatasi keadaan darurat kebakaran lahan dan hutan atau keadaan lain yang memerlukan penanganan khusus. (www.indofire.org/)

Bisa dilihat pada data hasil kerja yang diukur dari input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil). Pegawai mempunyai beban tugas dengan intensitas tinggi dan mempunyai banyak pekerjaan di ruang lingkup kantor dimana pegawai mempunyai banyak tugas yang harus mengkondisikan

pegawai terjun langsung atau dinas ke luar daerah untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Menyadari kondisi tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai pengaruh pemberian motivasi terhadap efektivitas pegawai, dengan cara melakukan pengukuran dan pengujian atas variable motivasi hubungannya dengan efektivitas.

Apabila terbukti bahwa komponen-komponen motivasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai, maka perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap pemberian motivasi agar para pegawai bisa dengan baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian apakah ada keterhubungan antarmotivasi terhadap efektivitas kerja di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dengan judul : **“PENGARUH MOTIVASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN”**.

(Studi Kasus di Kementerian Kehutanan Jakarta)

1.4 PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut, masalah yang timbul adalah berkaitan dengan kemungkinan adanya pengaruh antara motivasi dan disiplin kerja terhadap efektivitas Pegawai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana motivasi kerja pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Jakarta?
2. Bagaimana efektivitas kerjapada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Kehutanan Jakarta?
3. Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap efektivitas kerja pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Kehutanan Jakarta?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui motivasi kerja yang diberikan pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Jakarta
2. Mengetahui efektivitas kerja pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Kehutanan Jakarta
3. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap efektivitas kerja di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Kehutanan Jakarta

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi antara lain :

a. Aspek Teoritis

Untuk memahami pengaruh motivasi terhadap efektivitas pegawai di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan baik secara parsial maupun simultan dan untuk mengetahui faktor yang lebih dominan pengaruhnya terhadap efektivitas pegawai di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan.

b. Aspek Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai input atau rekomendasi menyusun strategi peningkatan efektivitas kerja pada Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di Kementerian Kehutanan Jakarta.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi mengenai tinjauan objek studi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai penelitian terdahulu (*literature review*), landasan teori atau teori-teori yang mendukung penelitian ini, serta kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III berisi mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, desain kuesioner dan skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik sampling, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV menceritakan hasil dan pembahasan mengenai karakteristik responden dilihat dari berbagai aspek, membahas dan menjawab rumusan masalah serta hasil perhitungan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini berisi mengenai kesimpulan hasil analisis, saran bagi organisasi dan saran bagi penelitian selanjutnya.